

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan adalah perubahan dari seorang individu setelah mengalami proses pendidikan yang membawa implikasi dan perkembangan terhadap dirinya secara pribadi, kehidupan bermasyarakat atau bahkan bagi pembangunan bangsa dan negaranya (Hidayat & Abdillah, 2019). Dengan kata lain pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu negara melalui adanya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dengan pola pikir yang lebih baik dan terarah. Hal ini disepakati dengan dimuatnya upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas sebagai tujuan ke-4 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pada tingkat nasional, salah satu tujuan negara yang tercantum secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945 ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pasal 31 ayat 1 serta ayat 3 dengan tegas turut mengamanatkan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua ketentuan pada tingkat global dan nasional tersebut menjadi sebuah konsensus yang menyepakati bahwa pendidikan menjadi aspek krusial sehingga pemerintah wajib untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat dengan sebaik mungkin.

Era modern seperti saat ini, revolusi industri dan globalisasi menghadirkan suatu tuntutan yang lebih besar terhadap dunia pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Teknologi yang berkembang semakin cepat membuat berbagai sektor mulai diintervensi dengan adanya teknologi-teknologi seperti halnya robot dan *artificial intelligence* (AI) dan mulai banyak pekerjaan yang perannya digantikan oleh kedua inovasi tersebut. Kondisi tersebut merupakan fenomena yang nyata terjadi dan berangkat dari fenomena tersebut mulai muncul pergeseran atau evolusi pekerjaan. Mayoritas pekerjaan yang masih dapat bertahan di tengah derasnya perkembangan teknologi ialah pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian dan kreativitas dan juga pekerjaan yang membutuhkan keahlian untuk berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi dengan efektif, melakukan riset serta pengerjaan sejenisnya (Savitri, 2019).

Tabel 1.1. Lowongan Kerja Berdasarkan Level Pendidikan

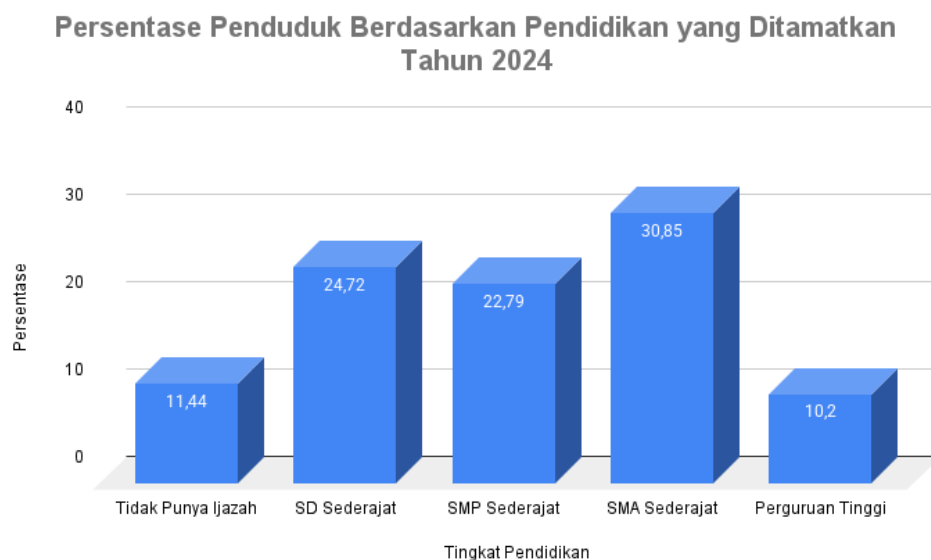
Pendidikan	Tingkat Pekerjaan	Kuota
SD	<i>Junior/ Entry Level</i>	-
	<i>Supervisor/ Coordinator/ Middle Level</i>	-
	<i>Manager/ Assistant Manager/ Senior Level</i>	-
SMP	<i>Junior/ Entry Level</i>	403
	<i>Supervisor/ Coordinator/ Middle Level</i>	-
	<i>Manager/ Assistant Manager/ Senior Level</i>	-
SMA/SMK/	<i>Junior/ Entry Level</i>	4.127

Sederajat	<i>Supervisor/ Coordinator/ Middle Level</i>	405
	<i>Manager/ Assistant Manager/ Senior Level</i>	292
Diploma	<i>Junior/ Entry Level</i>	1.572
	<i>Supervisor/ Coordinator/ Middle Level</i>	536
	<i>Manager/ Assistant Manager/ Senior Level</i>	446
S1	<i>Junior/ Entry Level</i>	5.582
	<i>Supervisor/ Coordinator/ Middle Level</i>	1.928
	<i>Manager/ Assistant Manager/ Senior Level</i>	965
S2	<i>Junior/ Entry Level</i>	439
	<i>Supervisor/ Coordinator/ Middle Level</i>	402
	<i>Manager/ Assistant Manager/ Senior Level</i>	253
S3	<i>Junior/ Entry Level</i>	198
	<i>Supervisor/ Coordinator/ Middle Level</i>	200
	<i>Manager/ Assistant Manager/ Senior Level</i>	188

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2024)

Perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi membawa tuntutan besar bagi sumber daya manusia, yang kini tidak hanya bersaing dengan sesama melainkan juga bersaing dengan teknologi yang semakin berkembang (Savitri,2019). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pendidikan tingkat menengah atas maupun kejuruan seolah tidak cukup untuk menjawab tantangan

perubahan zaman sehingga salah satu cara untuk terus bertahan dan menciptakan generasi yang lebih unggul adalah dengan melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Pasar kerja domestik maupun global merespon perkembangan zaman dengan menaikkan standar dan memberikan kualifikasi yang tinggi terhadap permintaan tenaga kerja, di mana saat ini lowongan pekerjaan mayoritas dibuka untuk lulusan perguruan tinggi yang bergelar sarjana (Kemenaker: 2024).



Gambar 1.1. Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti (2024)

Kementerian Ketenagakerjaan (2024) mengungkapkan alasan pengangguran di Indonesia adalah berakar dari kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, serta tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar tenaga kerja. Situasi tersebut menjadi tidak sebanding dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang jumlah lulusan perguruan tingginya

hanya mencapai 10% dari total populasi orang dewasa. Jumlah tersebut tertinggal jauh dengan negara-negara yang ada di dunia bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah lulusan perguruan tinggi terendah di ASEAN.

Kajian dari Harahap et.al (2021) mengemukakan bahwa besaran biaya pendidikan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi harus memperhitungkan dengan baik biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa karena hal tersebut berkaitan secara langsung dengan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan studi. Oleh sebab itu pemerintah harus mampu menerbitkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi.

Di samping itu, persentase anggaran pendidikan dari total PDB memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat pendaftaran perguruan tinggi (Ma, 2023). Dengan kata lain semakin tinggi persentase anggaran maka akan semakin tinggi pula tingkat pendaftaran pada jenjang perguruan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus mampu menetapkan strategi kebijakan pendidikan yang tepat agar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi menjadi lebih besar sehingga generasi yang unggul sebagai pondasi pembangunan bangsa.

Faktor eksternal berupa kondisi ekonomi menjadi alasan utama rendahnya jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia (Abdullah & Gani, 2022). Orang tua dan wali siswa tentu saja menginginkan anaknya untuk mengenyam bangku pendidikan hingga jenjang yang tertinggi, akan tetapi kondisi finansial keluarga yang terbatas karena faktor biaya pendidikan tinggi yang begitu besar menjadi suatu

kendala yang dihadapi masyarakat sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Masyarakat pun menjadi semakin enggan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi karena muncul isu yang pada awal tahun 2024 ini meledak, yakni terkait dengan kenaikan biaya kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri Indonesia.

Kebijakan kenaikan biaya pendidikan terutama pada UKT di universitas negeri menjadi perbincangan masyarakat, karena kondisi tersebut terjadi di banyak perguruan tinggi. Kasus-kasus tersebut terjadi pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret, Universitas Riau, Universitas Negeri Yogyakarta dan kampus-kampus lainnya. Kenaikan biaya pendidikan yang dialami pun tidak wajar dan sangat masif pada program studi tertentu. Kondisi tersebut menuai kritik karena dinilai merugikan masyarakat terutama mahasiswa. Sebagai kelompok yang paling merasakan dampak dari kebijakan tersebut maka mahasiswa mulai menyuarakan penolakan terhadap isu kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi. Masyarakat umum juga mulai vokal dalam menyuarakan opini kontranya terhadap isu tersebut dengan berbagai cara. Berikut adalah gambar aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa UNS untuk menolak kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi:



Gambar 1.2. Unjuk Rasa Mahasiswa UNS Tolak Kenaikan UKT

Sumber: DetikJateng (2024)

Salah satu bentuk aksi penolakan terhadap kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi yang diinisiasi oleh mahasiswa terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Mahasiswa menjalankan aksi unjuk rasa yang dilatarbelakangi oleh kenaikan UKT yang sangat drastis hingga mencapai 300% bahkan 500%. Salah satu contohnya terjadi pada program studi Ilmu Keperawatan di kelas internasional yang semula hanya sebesar Rp. 9 juta kini menaik 5 kali lipat hingga mencapai Rp. 52 juta. Berdasarkan laporan berita Nasional Tempo (2024), ratusan mahasiswa Unsoed yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat menuntut agar mencabut Peraturan Rektor Nomor 6/2024 yang memuat pengaturan terbaru biaya pendidikan Universitas Jenderal Soedirman. Sedangkan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta terjadi pula aksi protes penolakan

kenaikan UKT yang dilakukan oleh mahasiswa di depan gedung rektorat. Melansir dari unggahan DetikJateng (2024) dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Komersialisasi Pendidikan” mahasiswa mengajukan 8 tuntutan yang salah satunya adalah penghapusan UKT golongan 9 yang diiringi dengan pemberian keringanan melalui penurunan tarif UKT.

Adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim melalui Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di PTN Kemendikbud Ristek dinilai menjadi penyebab kenaikan biaya pendidikan pada jenjang perguruan tinggi yang ditandai dengan bertambahnya jumlah golongan dan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Kebijakan tersebut melatarbelakangi adanya kenaikan biaya kuliah yang tidak wajar dan berdampak pada terhambatnya kesempatan dan turunnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Mahalnya biaya pendidikan menjadi suatu alasan meraih Indonesia Emas 2045 menjadi semakin sulit sebab tingginya biaya pendidikan tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika muncul pernyataan dari salah satu pejabat Kemendikbud yang memicu perdebatan masyarakat di ruang publik. Dikutip dari unggahan berita harian Kompas.com (2024), Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie memberikan pernyataan yang menyebut bahwa pendidikan tinggi merupakan suatu kebutuhan tersier. Pernyataan tersebut diikuti dengan penjelasan bahwa pendidikan

tinggi bukan termasuk dalam program wajib belajar sehingga pendanaan pemerintah difokuskan kepada pembiayaan wajib belajar 12 tahun yang merupakan amanat dari undang-undang. Pernyataan tersebut memberikan penegasan bahwa pendidikan pada masa kini telah menjadi suatu kebutuhan tersier yang tidak dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa.

Pernyataan tersebut memicu berbagai respon dari publik bahkan banyak pengamat pendidikan dan juga tokoh-tokoh publik mulai mengkritik pernyataan dari Kemendikbud tersebut. Salah satu contoh ialah Ubaid Matraji, koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang memberikan penilaian bahwa menempatkan pendidikan tinggi sebagai suatu kebutuhan tersier merupakan kesalahan yang teramat besar. Hal ini dikarenakan pernyataan tersebut mampu melukai perasaan dari masyarakat dan menciptakan mimpi buruk bagi anak bangsa yakni tidak bisa mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi dengan layak. Melansir unggahan berita dari Kompas.com (17/5/2024), lebih lanjut Ubaid menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya menganggap pendidikan perguruan tinggi sebagai *public goods* karena menyangkut hajat hidup banyak orang dan menjadi kebutuhan bagi seluruh warga negara yang harus dipenuhi.

Suatu kondisi menarik yang dapat diamati di tengah memanasnya isu kenaikan UKT mahasiswa pada banyak perguruan tinggi di Indonesia ini ialah suatu fenomena dimana banyak mahasiswa dan masyarakat umum mulai menyuarakan aspirasinya terhadap isu tersebut melalui media sosial hingga menjadi viral. Gencarnya diskursus pembahasan mengenai kenaikan biaya kuliah ini memancing respon pemerintah dengan mengundang perwakilan mahasiswa yang tergabung

dalam BEM SI untuk menghadiri RDPU bersama dengan Komisi X DPR RI guna membahas permasalahan tentang isu kenaikan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi ini. Melansir unggahan berita dari Detik.com (27/5/2024) pada RDPU tersebut tidak hanya terjadi dialog dengan mahasiswa, masifnya aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat melalui media sosial mengenai kenaikan biaya pendidikan tinggi yang tidak rasional kemudian ditanggapi dengan pemanggilan Nadiem Makarim oleh Komisi X DPR RI sebagai konsekuensi dari kegaduhan yang telah terjadi. Pada akhirnya, muncul kebijakan baru berupa keputusan pembatalan kenaikan UKT dan IPI pada tingkat perguruan tinggi di Indonesia.

Fenomena tersebut dapat terjadi mengingat terdapat pengaruh besar yang diberikan oleh media sosial terhadap kebijakan publik. Media sosial memberikan pengaruh positif terutama dalam meningkatkan partisipasi publik pada proses pengambilan keputusan sekaligus sebagai ruang untuk melakukan diseminasi terkait isu-isu kebijakan publik yang sedang marak diperbincangkan (Zhang, 2023). Masyarakat merasa lebih nyaman untuk melakukan partisipasi dalam suatu pengambilan keputusan karena adanya persepsi yang sama dari satu komunitas yang ada di sekitar mereka. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui penggunaan berbagai *platform* media sosial. Melalui media sosial masyarakat dapat membentuk suatu kelompok untuk menentang kebijakan atau justru mengusulkan audiensi terhadap pemerintah dengan berbagai upaya yang terencana (Latifah & Najicha, 2022). Media sosial memberikan implikasi nyata kepada kebijakan publik dengan memberikan ruang kepada warga negara untuk melakukan partisipasi sekaligus

memobilisasi partisipasi tersebut agar membentuk suatu opini publik yang dapat diteruskan menjadi sebuah agenda kebijakan publik.



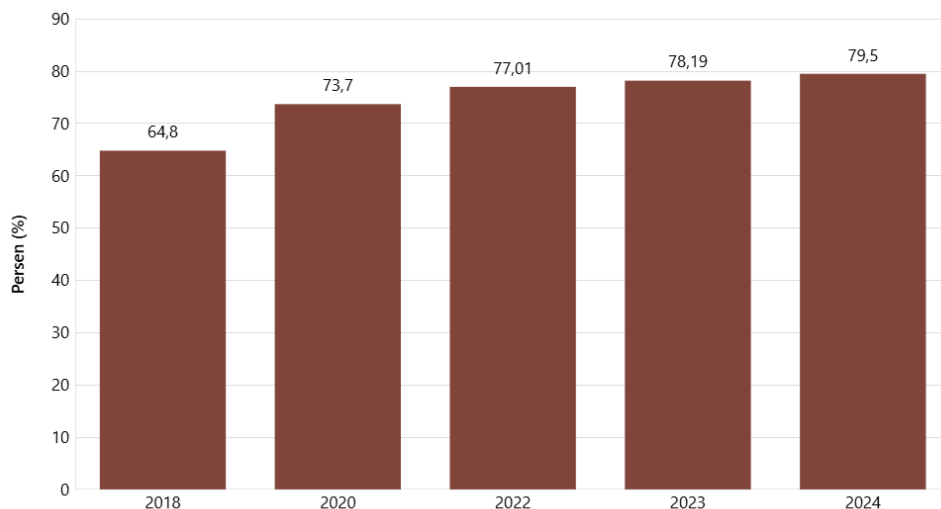
Gambar 1.3. Cuitan Netizen Twitter tentang Kenaikan UKT

Sumber: Twitter, data diolah peneliti (2024)

Besarnya unggahan yang menanggapi isu kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi ini menandakan bahwa partisipasi publik pada saat ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih dilakukan dengan metode konvensional. Perubahan zaman yang menuntut adanya peralihan penggunaan teknologi telah merubah dan menimbulkan pergeseran terhadap praktik partisipasi publik, yang dalam konteks ini adalah dalam menanggapi isu kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi. Metode partisipasi publik yang dulu diselenggarakan secara konvensional melalui media-media mainstream dan perkumpulan pada suatu ruang publik kini beralih menuju partisipasi publik dengan metode baru dengan

menggunakan media yang lebih modern pada ruang publik yang terdigitalisasi (Rahman et al., 2023).

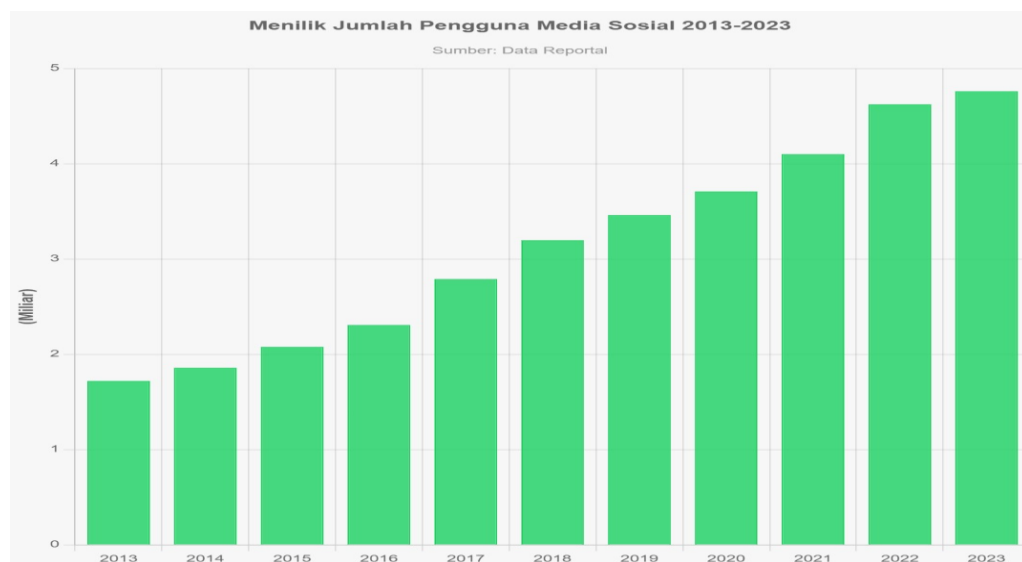
Pergeseran penggunaan ruang publik tersebut dilatarbelakangi oleh modernisasi yang memunculkan adanya transformasi digital yang menyasar di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital ini ditandai dengan adanya peningkatan penggunaan perangkat elektronik serta semakin bertambahnya jumlah individu yang terhubung dengan internet. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social (2025), per Februari 2025 terdapat total 67,9% dari populasi global atau setara dengan 5,56 miliar manusia telah terkoneksi dan menggunakan internet pada kehidupan sehari-hari. Angka tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sejumlah 2,5% yang setara dengan bertambahnya 136 miliar pengguna internet di seluruh dunia.



Gambar 1.4. Grafik Peningkatan Jumlah Pengguna Internet Indonesia

Sumber: Databoks.katadata (2024)

Gambar di atas menunjukkan terjadinya peningkatan penggunaan internet di Indonesia. Hampir seluruh daerah telah terhubung dengan koneksi internet dan mengaplikasikan penggunaan internet dalam berbagai dimensi kehidupan. Data survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan penetrasi internet di Indonesia yang pada tahun 2024 mencapai 79,5%. Hal tersebut menunjukkan rasio penduduk yang terhubung dengan jaringan internet telah mencapai 79,5% dari total populasi penduduk Indonesia yang setara dengan 221.563.479 jiwa.



Gambar 1.5. Peningkatan Jumlah Pengguna Media Sosial 2013-2023

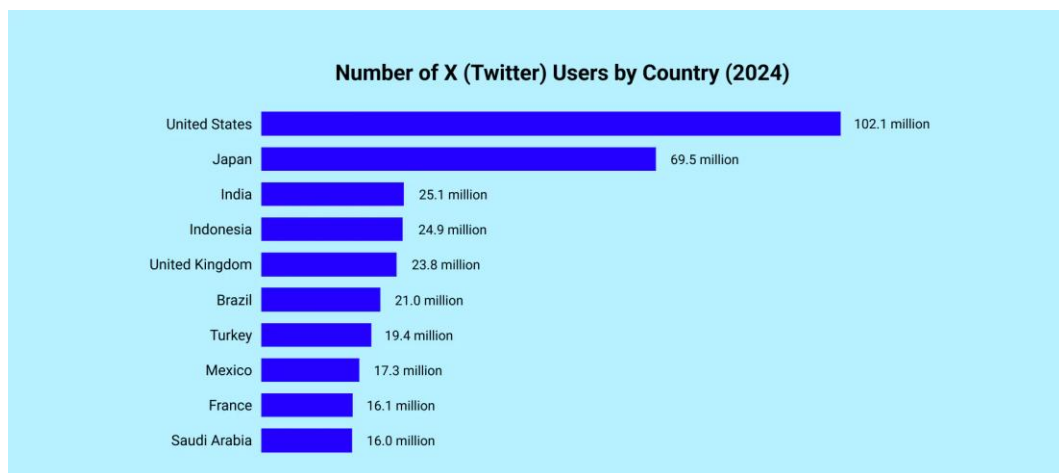
Sumber: Goodstats (2023)

Gambar 1.5 menunjukkan peningkatan pengguna media sosial di Indonesia selama satu dekade. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 pengguna sosial media di Indonesia pun telah tercatat terus mengalami peningkatan yang besar. Hampir seluruh masyarakat yang terhubung dengan jaringan internet memiliki media sosial.

Rilisan dari We Are Social (2025), menyatakan bahwa pada awal tahun 2024 hingga awal tahun 2025 telah terjadi peningkatan pengguna aktif media sosial di Indonesia sebesar 2,9% yang setara dengan penambahan 4 juta pengguna media sosial baru sehingga kini total pengguna media sosial aktif di Indonesia yang mampu diidentifikasi ialah sebanyak 143 juta pengguna pada Januari 2025. Peningkatan penggunaan sosial media yang masif selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran dalam melakukan interaksi pada kehidupan sosialnya termasuk berinteraksi dengan pemerintah. Sosial media telah menjadi alat yang vital dalam menjalankan *Government to Citizens communications* dimana sosial media dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pemerintah (Alenzi & Miskon, 2024).

Keberadaan media sosial yang semakin marak digunakan oleh masyarakat telah mempengaruhi pola-pola interaksi dan perilaku masyarakat dalam bertindak dan menjalankan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dunia maya. Elizamiharti & Nelfira (2023) memberikan argumen bahwa melalui media sosial partisipasi publik dalam konteks politik menjadi lebih inklusif dan memungkinkan masyarakat dari berbagai golongan dan latar belakang untuk membuka suara dan mempengaruhi pengambilan keputusan publik dengan aspirasi yang mereka sampaikan melalui unggahan di media sosial. Rauchfleisch et al. (2021) menuturkan bahwa peran media tidak sebatas sebagai penyampai informasi, namun media turut memiliki peran untuk menjadi perangsang komunikasi dan diskusi yang interaktif pada suatu ruang publik. Media sosial mampu menjangkau partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang dilakukan secara lebih mudah

melalui ruang publik yang telah terdigitalisasi dimana hal tersebut memiliki potensi yang besar untuk menghadirkan implikasi terhadap penerapan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta optimalisasi peran masyarakat.



Gambar 1.6. Negara dengan Jumlah Pengguna Twitter Terbesar Tahun 2023

Sumber: Oberlo (2025)

Salah satu media sosial yang mengalami peningkatan penggunaan secara signifikan adalah Twitter di mana saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna Twitter terbesar di dunia. Masyarakat ramai menggunakan Twitter untuk berbagai tujuan baik itu berkomunikasi berbagi aspirasi maupun berinteraksi dengan sesamanya melalui cuitan di dunia maya. Penggunaan Twitter semakin meluas hingga aspek yang lebih politis yang mampu memengaruhi pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Munculnya beragam bentuk dari media digital yang salah satunya berupa Twitter mampu memunculkan bentuk aksi kolektif baru dan pengorganisasian partisipasi publik yang dilakukan secara digital (Thiel, 2023).

Salah satu contoh konkret adalah ketika publik menunjukkan sikap dan responnya terhadap kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi paling menonjol dilakukan melalui aplikasi Twitter sebagai salah satu ruang publik digital yang kini berkembang. Antusiasme dari pengguna Twitter yang begitu tinggi serta respon multidisiplin yang dapat diberikan oleh pengguna dari berbagai macam latar belakang membuat Twitter menjadi salah satu media sosial yang sesuai sebagai ruang publik yang mampu mengakomodasi segala bentuk partisipasi publik dalam merespon isu yang lahir dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Terbukti dengan banyaknya unggahan yang membahas mengenai isu kenaikan biaya kuliah dan banyaknya respon yang diberikan terhadap unggahan-unggahan tersebut. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai menyuarakan aspirasinya dan berupaya untuk terus mempengaruhi pemerintah agar kebijakan tersebut dapat dikaji ulang.

Peralihan partisipasi publik dalam merespon kebijakan Kemendikbud terkait dengan biaya pendidikan tinggi yang ini mayoritas dilakukan melalui Twitter merepresentasikan bahwa telah terjadi suatu pergeseran terhadap ruang publik di mana pada masa kini ruang publik menjadi semakin meluas dengan hadirnya media sosial. Keberadaan Twitter sebagai ruang media sosial yang menjadi sebuah ruang publik berbasis digital menghadirkan potensi tersendiri untuk meningkatkan fungsi dari ruang publik yakni sebagai suatu sarana yang menjadi sumber informasi sekaligus memfasilitasi warga negara untuk bertukar pikiran dan mengekspresikan diri sebagai wujud dari penerapan demokrasi serta pengawasan terhadap pemerintah. Twitter kini menjelma menjadi salah satu ruang diskusi masyarakat

tanpa batas yang bebas dari tekanan dan batasan-batasan peraturan seperti yang ada pada media mainstream (Rahman et al., 2023).

Keberadaan Twitter sebagai media sosial yang menjadi ruang publik baru yang berbasis digital memiliki potensi tersendiri untuk meningkatkan fungsi dari ruang publik sebagai suatu sarana yang menjadi sumber informasi sekaligus memfasilitasi warga negara untuk bertukar pikiran dan mengekspresikan diri sebagai upaya peningkatan demokrasi. Ruang publik yang saat ini diperluas dengan adanya media sosial semakin memfasilitasi konektivitas dan kemampuan berjejaring antar individu yang lebih besar sehingga mendorong terwujudnya suatu opini publik yang lebih inklusif (Zhang, 2023). Peralihan dari pelaksanaan partisipasi publik yang semula dilaksanakan secara konvensional hingga kemudian berubah dengan dilaksanakan melalui media komunikasi daring ini turut membentuk suatu perluasan terhadap ruang publik yang kini bertransformasi menjadi *digital public sphere* yakni suatu ruang yang memiliki fungsi yang sama dengan ruang publik konvensional namun mengalami perubahan media menjadi berbasis digital melalui internet dan media sosial.

Perkembangan media sosial sebagai bentuk dari *digital public sphere* atau ruang publik baru yang interaktif memungkinkan adanya penetrasi yang lebih besar terhadap partisipasi masyarakat termasuk dalam merespon kebijakan dari pemerintah sebagai bagian dari proses demokrasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Hardiman, 2010), ruang publik akan mencapai fungsi optimalnya ketika mampu mengembangkan suatu kondisi demokratis dalam skala yang luas. *Digital public sphere* yang kini direpresentasikan melalui media sosial mampu mendorong

terjadinya tindakan kolektif yang membuat para pengguna dapat dimobilisasi untuk mendiskusikan suatu isu secara bersama-sama sehingga dapat mencapai suatu opini publik. Dengan kata lain, keberadaan *digital public sphere* akan meningkatkan kohesi sosial sehingga masyarakat mampu melakukan partisipasi secara inklusif dalam sebuah diskursus pembahasan suatu isu yang terjadi di sosial media (Spitzmüller & Pfadenhauer, 2024). Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara mampu berkontribusi dengan melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah serta mengambil peran dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi dalam diskursus di media sosial.

Uraian di atas telah memberikan gambaran mengenai perkembangan dan transformasi digital yang telah menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap partisipasi publik yang dilaksanakan melalui ruang publik atau *public sphere*. Partisipasi publik dalam menanggapi dan merespon kebijakan dari pemerintah yang dulunya dilakukan secara konvensional mulai berubah dan beralih sehingga mayoritas dilakukan menggunakan media sosial sebagai media yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Kondisi ini juga turut terjadi pada pembahasan mengenai isu kenaikan biaya pendidikan tinggi yang menimbulkan berbagai respon dari masyarakat luas di mana respon tersebut merupakan bentuk partisipasi publik yang mulai dituangkan dalam basis digital melalui *public sphere* berupa media sosial Twitter. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka dapat disusun suatu pertanyaan penelitian bagaimana partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi melalui Twitter sebagai *digital public sphere* berlangsung?.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka, rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi melalui aplikasi Twitter sebagai *digital public sphere* di Indonesia?
2. Bagaimana pola partisipasi publik yang terbentuk sehingga masyarakat mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan pemerintah terkait kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi melalui aplikasi Twitter sebagai *digital public sphere* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi melalui aplikasi Twitter sebagai *digital public sphere* di Indonesia.
2. Menganalisis pola partisipasi publik yang terbentuk sehingga masyarakat mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan pemerintah terkait kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi melalui aplikasi Twitter sebagai *digital public sphere* di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penelitian yang akan datang terutama untuk memperkaya teori yang digunakan dalam studi administrasi publik yang menyoroti terkait peran *digital public sphere* dalam proses kebijakan publik yang partisipatif. Keberadaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembaca untuk mengenai topik yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial sebagai publik untuk mewadahi partisipasi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih luas serta pengalaman yang berkesan sehingga mampu memberikan bekal bagi peneliti agar mampu mempersiapkan diri menjadi manajer publik dan administrator yang kompeten. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu pemantik bagi peneliti selanjutnya untuk mendalami kajian isu-isu kontemporer administrasi publik seperti *digital public sphere* yang diangkat menjadi topik dalam penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi berupa rekomendasi dan kritik yang

konstruktif sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah untuk memaksimalkan keberadaan ruang publik dalam bentuk *digital public sphere*.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan masyarakat terutama dalam hal pemanfaatan media sosial khususnya Twitter sebagai *digital public sphere* yang dapat digunakan untuk melakukan bentuk-bentuk partisipasi serta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya partisipasi dan keterlibatan dalam mengawasi jalannya kegiatan pemerintah serta pelaksanaan proses-proses kebijakan publik.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penggunaan Twitter sebagai *public sphere* atau ruang publik. Muhammad Ihsan dan Ricardi S. Adnan (2022) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif memfokuskan kajian pada penggunaan ruang publik berupa Twitter dalam menyuarakan penolakan terhadap undang-undang cipta kerja. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa Twitter memiliki kedudukan penting dalam penolakan terhadap undang-undang cipta kerja dimana aktor secara bebas mampu membangun wacana dan meningkatkan partisipasi untuk saling berbagi

pengetahuan tentang undang-undang sikap kerja. Twitter memberikan ruang untuk mengintervensi kebijakan pemerintah dengan memberikan ruang untuk menyuarakan penolakan yang kuat disertai kritik tegas terhadap undang-undang cipta kerja yang dibuat oleh pemerintah.

Muhammad Farid (2023) melakukan studi yang berfokus untuk menggambarkan peran dari media sosial sebagai suatu ruang publik digital dalam melakukan pendidikan politik. Media sosial mampu mengubah metode pendidikan politik yang konvensional menjadi pendidikan politik yang lebih fleksibel. Hadirnya media sosial sebagai ruang publik baru mampu memberikan dampak yang positif terutama bagi meningkatnya demokrasi. Media sosial secara signifikan berperan dalam membentuk cara berpikir publik dan membentuk opini publik yang cenderung terkooptasi terhadap kekuasaan politik namun cara berpikir yang demikian memicu sebuah kerentanan yakni rentan terhadap otoritarianisme.

Selaras dengan penelitian sebelumnya, Sakyah Asmara dan Febry Ichwan Butsi (2020) berusaha untuk menganalisis peralihan penggunaan media baru berupa Twitter sebagai *public sphere* yang terdigitalisasi dalam mendukung komunikasi politik. Dengan menggunakan metode fenomenologi studi ini menjelaskan bahwa kini Twitter telah menjadi media baru yang efektif untuk menjangkau konstituen di berbagai lapisan. Komunikasi politik melalui media sosial mulai digunakan secara luas oleh para politikus. Penggunaan media sosial terutama Twitter dalam melakukan komunikasi politik mampu mengurangi potensi kaburnya makna dari pesan yang disampaikan. Hal ini justru sering terjadi pada komunikasi politik

melalui media mainstream yang harus melewati tahapan jurnalistik agar pesan dapat tersampaikan ke masyarakat luas.

Terdapat pula penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penggunaan Twitter sebagai ruang publik baru dalam mewadahi diskursus mengenai isu penundaan Pemilu 2024 yang diprakarsai oleh Mila Amalia Rahman, dkk. Temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran baru bahwa dalam diskursus yang terjadi pada ruang publik digital seperti Twitter banyak pihak mampu menjadi stakeholder yang memberikan pengaruh terhadap jaringan komunikasi yang berbentuk seperti halnya para pakar hukum politisi sehingga petinggi partai politik. Meskipun banyak stakeholder yang terlibat dalam advokasi melalui ruang publik digital namun hal ini tidak memberikan pengaruh pada opini publik. Diskursus yang terjadi memunculkan dua tipologi penggunaan internet yakni tipologi propagandis dan disseminator (Rahman et al., 2023).

Sebastian Kurten dan Kathleen Beullens melakukan kajian yang bertujuan melihat dinamika tweet masyarakat Belgia pada saat terjadinya pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis konten dari *tweet* yang telah didapatkan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Twitter menjadi media yang efektif bagi masyarakat Belgia untuk berkomunikasi dan berdiskusi selama masa *lockdown* akibat dari wabah Covid-19. Selain itu, analisis kuantitatif turut menyatakan bahwa melalui Twitter masyarakat dapat menunjukkan dukungannya terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi sekaligus mempererat solidaritas di kalangan masyarakat Eropa pada masa pandemi tersebut (Kurten & Beullens, 2021).

Muhammad Iqbal Khatami dan Novi Kurnia melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terkait proses demokrasi yang terjadi pada ruang digital terhadap isu pemecatan pegawai KPK. Melalui pengolahan data menggunakan metode *content analysis* didapatkan temuan bahwa perdebatan mengenai isu permasalahan pegawai KPK didominasi oleh kategori impresi dengan unggahan yang memiliki kecenderungan saling menyerang dan memberikan label kepada suatu kelompok tertentu. Akun-akun milik aktivis anti korupsi, *influencer*, serta media massa menjadi *opinion leaders* yang memimpin diskursus tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat diamati bahwa Twitter mampu menjadi sebuah wadah yang efektif untuk menerapkan e-demokrasi pada masa kini (Khatami & Kurnia, 2022).

Selanjutnya, terdapat pula penelitian yang berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana aktivisme digital *Black Lives Matter* digunakan sebagai upaya untuk menentang krisis ras pada orang kulit hitam di Amerika Serikat yang ditulis oleh Valeria V. Bondarenko, Olena V. Kaptiurova, dan Vira V. Orlova. Hasil analisis melalui metode *Critical Discourse Analysis* mendapati temuan bahwa Twitter sebagai *public sphere* digunakan sebagai alternatif bagi orang kulit hitam untuk merekonstruksi kembali ruang publik yang tidak rasis, diskriminatif dan didominasi oleh orang kulit putih. Pada perkembangannya kelompok oposisi kemudian mengubah tagar menjadi *#AllLivesMatter* yang dianggap menghilangkan legitimasi dari aktivisme digital *Black Lives Matter*. Twitter terbukti efektif membantu orang kulit hitam yang menjadi minoritas di Amerika untuk menyuarakan keadilan, nilai serta hak mereka sebagai manusia (Bondarenko et al., 2021).

Adrian Rauchfleisch, Daniel Vogler, dan Mark Eisenegger menggunakan metode kuantitatif menjalankan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap diskusi dan penggunaan sosial media Twitter sebagai alternatif ruang publik pada masa krisis Covid-19 di Swiss. Temuan penelitian menyatakan bahwa terjadi penyempitan topik pada diskursus yang terjadi di ruang publik yakni Twitter yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas diputar oleh para ahli yang sangat menyoroti dan berfokus pada pembahasan tentang Covid-19. Twitter menjadi sebuah ruang publik alternatif yang memprakarsai pembentukan jaringan komunikasi pada saat terjadinya krisis Covid-19 di Swiss sehingga warga dapat membentuk opini publik dan melakukan diskusi secara bebas meskipun sedang berada di tengah krisis pandemi (Rauchfleisch et al., 2021).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Rahma Utami, Rika Nurismah Safitri dan Yohanes Ari Kuncoroyakti, penelitian yang ditulis oleh Herdin Ari Saputra, Anang Setiawan dan Helen Dian Fridayani kembali memfokuskan kajian terhadap cara kerja komunikasi politik dan demokrasi melalui adanya tagar-tagar di Twitter yang menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang cipta kerja. Pengolahan data pada penelitian ini dibantu menggunakan *software* Nvivo 12 Plus yang mendapatkan temuan penelitian berupa komunikasi politik yang berjalan di Twitter melalui tagar-tagar penolakan terhadap rancangan undang-undang cipta kerja mampu membangun suatu jaringan komunikasi politik dan juga gerakan politik, kepentingan politik serta pembentukan kekuasaan dengan tujuan politik. Komunikasi politik yang terjadi diungkapkan melalui penolakan yang memiliki tendensi untuk menyuarakan kegelisahan apabila

terjadi ketidak sepakatan pendapat terhadap suatu rencana kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah rancangan undang-undang cipta kerja (Setiawan et al., 2021).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Badreya Al-Jenaibi yang berusaha untuk mengeksplorasi fenomena media sosial yang mampu memberikan dampak besar terhadap masyarakat Arab yang memiliki karakteristik tertutup. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis* yang dilakukan terhadap akun-akun jurnalis CGC penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Twitter sebagai sebuah *public sphere* telah mengubah wacana dan opini masyarakat di wilayah semenanjung Arab. Hal ini dapat terjadi karena *public sphere* bersifat bebas sehingga opini yang dituliskan benar-benar tersebar, dibaca serta didengarkan dan bukan disensor oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keberadaan Twitter sebagai *public sphere* telah membawa pengaruh besar terhadap perubahan pada masyarakat Arab yang konservatif menjadi masyarakat yang lebih terbuka seperti yang terjadi pada negara Qatar, UEA, dan Arab Saudi (Al-Jenaibi, 2020).

Perbedaan paling mendasar dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada isu yang diangkat. Dengan pemilihan isu tersebut maka fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi publik yang terbentuk dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia melalui aplikasi Twitter sebagai *digital public sphere*. Isu tersebut merupakan isu baru yang menimbulkan berbagai respon di ruang publik digital terutama media sosial Twitter. Kesamaan penggunaan teori *public sphere* oleh Jurgen Habermas tidak membatasi peneliti untuk mengkaji isu yang diangkat.

Melalui pendekatan kualitatif dengan metode *Social Media Network Analysis* yang digunakan dalam pengolahan data menghadirkan suatu keterbaruan yang mampu menutup kekurangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan menggunakan teori yang sama. Penggunaan metode *Social Media Network Analysis* mampu memberikan gambaran terkait partisipasi publik yang terjadi pada ruang publik digital berupa Twitter dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, sehingga dapat memberikan perubahan terhadap kebijakan.

Rangkuman dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas diringkas pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu
Sumber: Data diolah peneliti dari berbagai sumber (2024)

NO.	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Ihsan, Muhammad dan Ricardi S. Adnan, 2022	Menganalisis penggunaan ruang publik virtual untuk menyuarakan penolakan terhadap undang-undang cipta kerja.	Teori ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas (1962) digunakan sebagai landasan penelitian. Ruang publik bukan hanya menjadi suatu sarana publik untuk bertemu melainkan juga berdebat, berdiskusi dan secara bebas tanpa diintervensi oleh aturan negara serta tidak mendapat tekanan dari siapapun.	Pendekatan kualitatif metode deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan <i>metode crowling</i> data dari Twitter dan diolah melalui reduksi, penyajian, serta interpretasi data.	Twitter berperan sebagai ruang publik yang memiliki kedudukan penting sehingga aktor dapat secara bebas membangun wacana dan partisipasi untuk berbagi pengetahuan terkait undang-undang cipta kerja. Twitter mampu menjadi ruang alternatif untuk mengintervensi kebijakan undang-undang cipta kerja yang lebih banyak mendapatkan respon penolakan kuat dan disertai dengan tagar penolakan.
2.	Farid, Muhammad, 2023	Menggambarkan peran media sosial sebagai ruang publik digital dalam melakukan pendidikan politik.	<i>Public sphere</i> oleh Jurgen Habermas yang menyatakan bahwa demokrasi akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya media massa sebagai ruang publik. Ruang publik ditandai dengan ciri	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	Media sosial mampu mengubah metode pendidikan politik dan meningkatkan demokrasi. Media digital secara signifikan berperan dalam membentuk cara pikir publik yang cenderung terkooptasi kepada kekuasaan politik. Namun

			bebas dari dominasi dan setara (dapat diakses oleh semua kalangan)		cara pikir ini membentuk budaya masyarakat yang rentan terhadap otoritarianisme.
3.	Asmara, Sakhyani, dan Febry Ichwan Butsi, 2020	Menganalisis peralihan penggunaan media baru berupa Twitter dalam mendukung komunikasi politik.	Teori komunikasi politik yakni suatu bentuk penyampaian pesan yang memiliki dampak politik dari para politikus kepada rakyat maupun penyampaian aspirasi dari rakyat terhadap para penguasa politik. <i>Public Sphere</i> oleh Habermas yang memiliki potensi sebagai landasan masyarakat berdemokrasi. <i>Public sphere</i> awalnya dikuasai kaum Borjuis kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi internet membawa perkembangan pada bentuk ruang publik yang terdigitalisasi.	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi. Data didapatkan melalui metode wawancara.	Twitter menjadi media yang efektif untuk menjangkau konstituen. Komunikasi politik yang dilakukan politisi menjadi mudah, murah, dan bebas. Komunikasi politik melalui media sosial Twitter mengurugi potensi kaburnya makna dari pesan yang disampaikan seperti yang terjadi pada komunikasi melalui media mainstream.
4.	Rahman, Mila Amalia, dkk,	Menganalisis penggunaan	Landasan teori menggunakan teori Jurgen	Pendekatan kualitatif dengan	Diskursus mengenai isu penundaan pemilu pada aplikasi

	2023	Twitter sebagai ruang publik baru dan perubahan sosial pada masyarakat dalam pembahasan isu penundaan pemilu 2024.	Habermas yakni <i>public sphere</i> . <i>Public sphere</i> menjadi sebuah kawasan netral bagi publik untuk berdiskusi secara rasional, membentuk opini publik serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah.	metode studi kasus prospektif. Data diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dan studi literatur.	Twitter didominasi narasi kontra dan kritik. Pakar hukum, politisi, serta petinggi partai politik turut melakukan advokasi melalui Twitter namun tidak berpengaruh terhadap opini publik. Diskursus tersebut memunculkan dua tipologi yakni propagandis dan disseminator.
5.	Khatami, Muhammad Iqbal, dan Novi Kurnia, 2022	Menganalisis proses demokrasi yang terjadi pada ruang publik digital dalam konteks pemecatan pegawai KPK.	Teori <i>E-democracy</i> oleh Tsagarousianous (1999). Demokrasi memiliki tiga aspek yakni penyajian informasi, musyawarah, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga aspek tersebut menjadi struktur demokrasi yang terjadi pada ruang siber melalui media internet.	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode <i>content analysis</i> . Data didapatkan melalui Twitter dan diproses menggunakan <i>software</i> Nvivo 12 plus.	Perdebatan pada konteks isu pemecatan pegawai KPK didominasi oleh kategori impresi dengan unggahan saling serang hingga pemberian label pada kelompok tertentu. Stakeholder kunci atau yang menjadi opinion leader dalam perdebatan tersebut didominasi oleh akun milik influencer, aktivis anti korupsi dan media massa. Media sosial yang dalam hal ini adalah Twitter mampu menjadi wadah efektif untuk menerapkan <i>e-democracy</i> .
6.	Kurten, Sebastian, dan Kathleen	Melakukan kajian terhadap variasi jumlah <i>tweet</i> saat	Teori <i>agenda-setting</i> oleh McCombs (1972) yang menitikberatkan pada	Metode kuantitatif dengan analisis berupa <i>time series</i>	Twitter menjadi forum bagi masyarakat untuk berdiskusi ketika terjadi <i>lockdown</i> saat

	Beullens, 2021	pandemi serta menganalisis isi dan dinamika dari <i>tweet</i> yang ditampilkan	kemampuan untuk mengubah suatu isu yang umum menjadi masalah publik atau masalah kebijakan setelah mendapatkan perhatian yang besar dari media.	<i>analysis, network bigrams, topic models</i> dan <i>emosional lexica</i> .	Pandemi Covid-19 dan mengindikasikan adanya dukungan masyarakat Belgia terhadap kebijakan pemerintah sekaligus menghargai solidaritas masyarakat yang ada di Eropa.
7.	Bondarenko, Valeria V., Olena V. Kaptiurova, dan Vira V. Orlova, 2021	Mengeksplorasi bagaimana diskursus aktivisme digital <i>BLM (Black Lives Matter)</i> digunakan untuk menentang krisis ras pada orang kulit hitam di Amerika dan menentang antagonis wacana <i>#AllLivesMatter</i>	Teori <i>public sphere</i> oleh Jurgen Habermas. Akses terhadap ruang publik yang dahulu tidak dapat diakses oleh masyarakat kelas bawah kini menjadi lebih bebas dan dapat diakses oleh semua kalangan secara masif karena terdapat perkembangan teknologi.	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode CDA (<i>Critical Discourse Analysis</i>).	Twitter sebagai <i>public sphere</i> digunakan sebagai alternatif orang kulit hitam untuk merekonstruksi kembali ruang yang tidak rasis, diskriminatif dan didominasi oleh orang kulit putih. Kelompok oposisi kemudian mengubah tagar menjadi <i>#AllLivesMatter</i> yang kemudian dianggap menghilangkan legitimasi dari aktivisme digital BLM.
8.	Rauchfleisch, Adrian, Daniel Vogler, dan Mark Eisenegger, 2021	Menganalisis diskusi dan penggunaan media sosial Twitter sebagai alternatif ruang publik pada masa krisis	Teori <i>public sphere</i> oleh Habermas. Ruang publik dikonseptualisasikan sebagai suatu jaringan komunikasi. Ruang publik mampu memperlihatkan secara komprehensif	Metode kuantitatif dengan data yang diambil dari Twitter.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyempitan topik pada ruang publik yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas di Twitter oleh para ahli yang menyoroti Covid-19. Twitter menjadi sebuah ruang publik

		utamanya pada saat terjadi pandemi Covid-19 di Swiss.	bagaimana proses penyebaran informasi yang terjadi pada saat krisis dan memperlihatkan aktor mana saja yang memperoleh atau bahkan kehilangan pengaruhnya.		alternatif yang memprakarsai pembentukan jaringan komunikasi pada masa terjadinya krisis Covid-19 di Swiss.
9.	Saputra, Herdin Arie, Anang Setiawan, Helen Dian Fridayani, 2021	Melakukan analisis terhadap cara kerja komunikasi politik dan demokrasi berlangsung melalui #MosiTidakPercaya dan #TolakOmnibus Law pada diskusi terkait penolakan undang-undang cipta kerja pada aplikasi Twitter.	Teori <i>public sphere</i> oleh Habermas. Ruang publik adalah suatu arena diantara pemerintah dan publik dimana orang orang berkumpul untuk menyuarakan kepentingannya. Ruang publik mampu memunculkan opini publik yang dapat menentang kebijakan nar yang tidak demokratis, mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong aspirasi publik yang rasional serta kritis.	Pendekatan kualitatif dengan analisis dan pengolahan data yang dibantu oleh <i>software Nvivo 12 Plus</i> .	Twitter mampu membangun komunikasi politik dan juga membangun gerakan politik, kepentingan politik serta pembentukan kekuasaan dengan tujuan politik. Memberikan tekanan terhadap pemerintah dan membentuk opini publik atas RUU cipta kerja melalui Twitter sebagai ruang publik memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki tendensi untuk menyuarakan kegelisahannya apabila terjadi ketidak sepakatan pendapat terhadap suatu kebijakan yang diterbitkan pemerintah.
10.	Al-Jenaibi, Badreya, 2020	Mengeksplorasi fenomena media	Memakai teori <i>public sphere</i> oleh Habermas. Ruang	Pendekatan kualitatif dengan	Penggunaan Twitter sebagai sebuah <i>public sphere</i> telah

		sosial yang memberikan dampak besar terhadap masyarakat Arab yang relatif tertutup serta mengkaji perubahan sifat masyarakat yang terbentuk melalui public sphere.	publik menjadi tempat untuk membangun opini publik yang lebih luas dan bebas dari intervensi serta tekanan kepentingan dari berbagai pihak.	metode <i>content analysis</i> pada 4 akun jurnalis di Twitter.	mengubah wacana dan opini masyarakat Arab di wilayahnya semenanjung Arab karena opini yang dituliskan benar-benar tersebar, dibaca, didengarkan dan bukan disensor. Keberadaan media sosial terutama Twitter sebagai <i>public sphere</i> telah membawa pengaruh besar terhadap perubahan pada masyarakat Arab yang konservatif seperti halnya pada masyarakat Arab Saudi, Qatar dan juga UEA.
--	--	---	--	--	---

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan negara dan masyarakat di mana dalam melakukan aktivitasnya manusia pasti bersinggungan dengan administrasi publik di segala aspek kehidupan. Chandler dan Plano (Keban, 2019) memberi definisi Administrasi Publik sebagai suatu proses dimana dalam proses tersebut terjadi pengorganisasian sumber daya dan personel yang dimiliki oleh sektor publik guna memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan yang ada dalam kebijakan publik.

Pendapat lain yang dikemukakan Nigro & Nigro (dalam Keban, 2019) terhadap pendefinisian administrasi publik yang lebih menekankan pada proses institusional. Dalam hal ini Administrasi Publik dipandang sebagai bentuk usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan sektor publik yang mencakup tiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif. Masing-masing cabang memiliki peran penting dalam mempromosikan kebijakan sehingga dapat menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan yang terjadi di sektor privat atau swasta.

Dimock (dalam Anggara, 2012) memiliki pandangan yang cukup berbeda terkait dengan Administrasi Publik. Ia memandang bahwa administrasi publik adalah suatu proses yang meliputi seluruh rangkaian dari mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai hingga pada penyelenggaraan dan pencapaian tujuan tersebut. Kemudian Dimock turut menambahkan bahwa proses tersebut merupakan suatu kegiatan produksi

barang dan jasa yang direncanakan dengan seksama untuk melayani kebutuhan masyarakat yang artinya dalam definisi ini memandang administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi yang peruntukannya dikhususkan untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik. Dari pernyataan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa definisi administrasi publik ialah suatu proses pengorganisasian yang didalamnya terjalin kerjasama dalam berbagai dimensi guna mencapai tujuan pemerintah.

Studi administrasi publik tidak hanya menekankan pada kerjasama antar elemen dalam suatu negara dalam mencapai suatu tujuan. Dalam studi administrasi publik, membentuk pemerintah yang akuntabel dan demokratis melalui adanya partisipasi dari masyarakat merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dari suatu birokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan suatu arena berupa ruang publik yang mampu menjadi wadah partisipasi publik dalam menjalankan perannya untuk berpartisipasi aktif dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah agar mampu menjaga akuntabilitas dari birokrasi dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan publik.

Kajian dalam studi administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari peran besar teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menjadi sumber data sekaligus media untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi publik. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang

modern mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses administrasi publik sehingga membentuk pemerintah yang lebih responsif terhadap isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat (Mazaev, 2024). Dalam hal ini, terdapat peran besar dari teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan ruang publik untuk berpartisipasi. Dalam kajian Administrasi Publik data-data yang bersumber dari teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan pembentukan kebijakan publik maupun melakukan perubahan terhadap kebijakan publik dengan melihat respons dari masyarakat dan kelompok sasaran dari sebuah kebijakan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik telah berkembang seiring dengan perubahan zaman begitu pula dengan paradigmanya. Denhardt dan Denhardt membagi administrasi publik menjadi tiga kelompok besar paradigma yang terdiri atas *The Old Public Administration* (OPA), *The New Public Management* (NPM), dan *The New Public Service* (NPS) yang masing masing paradigma memiliki karakteristik tersendiri. Paradigma pertama yakni OPA tidak dapat dilepaskan dari adanya dikotomi politik dan administrasi yang menegaskan bahwa administrasi tidak seharusnya terkooptasi dengan kepentingan politik sehingga dalam menjalankan kebijakan publik birokrasi dapat berjalan secara netral dan profesional. Di samping itu konsep birokrasi weberian juga menjadi ciri

yang paling menonjol dari paradigma OPA. Namun konsep birokrasi ideal yang dikemukakan oleh Weber ini menjadi kritik yang sangat signifikan terhadap paradigma OPA karena model birokrasi weberian memunculkan struktur birokrasi yang gemuk dan menjadi sebab timbulnya inefisiensi pelayanan dengan birokrasi yang berlapis-lapis serta peraturan yang begitu banyak kompleks namun tidak memiliki dampak yang signifikan.

Munculnya kritik yang begitu keras terhadap paradigma OPA memunculkan adanya gerakan reformasi pada manajemen sektor publik yang memunculkan konsep baru yakni paradigma *New Public Management* atau NPM. Paradigma NPM begitu reformatif dengan memunculkan konsep *reinventing government* yang mengadopsi semangat dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh sektor privat ke dalam sektor publik untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik. Paradigma NPM turut menuai kritik karena dianggap terlalu berorientasi pada nilai-nilai yang berkembang di sektor privat yang menyebabkan adanya ketimpangan pelayanan bagi masyarakat karena terlalu mendahulukan kepentingan kewirausahaan daripada hak-hak masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya (Prasojo, 2023).

Denhardt dan Denhardt menganggap bahwa NPM tidak sesuai dengan esensi dari keberadaan negara yakni untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sehingga menginisiasi lahirnya suatu pemikiran baru terhadap perkembangan paradigma administrasi publik dengan munculnya paradigma *New Public Service* atau NPS (Prasojo,

2023). *New Public Service* berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat sebagai warga negara selaku pemilik sah dari negara dan bukan sebagai pelanggan. Paradigma ini didasarkan pada esensi dari birokrasi yang seharusnya memberikan pelayanan secara bertanggung jawab kepada masyarakat dengan berpegang pada nilai-nilai demokrasi (Dharma, 2023). *New Public Service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan dan melayani kepentingan dari masyarakat itu sendiri sehingga dalam paradigma ini muncul semboyan yang begitu melekat yakni *serving rather than steering*.

Selain tiga klasifikasi paradigma yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhard tersebut, muncul pula paradigma *Governance* yang berkembang pada tahun 1990. Paradigma ini memperkenalkan pandangan baru dalam administrasi publik terutama dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan. Negara bukan lagi satu-satunya aktor tunggal yang memainkan peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi terdapat aktor-aktor lain atau *stakeholder* lain yakni sektor privat dan *civil society* atau masyarakat. Paradigma governance menekankan pada pentingnya kolaborasi dimana peran masing-masing aktor disinergikan agar mampu mencapai suatu keputusan yang tepat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Robert Eystone (dalam Mustari, 2015) memberikan definisi yang begitu luas pada kebijakan publik yakni melihat kebijakan publik sebagai hubungan yang terjalin antara suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Berdasarkan definisi tersebut kebijakan publik dapat mencakup begitu banyak hal yang meliputi hampir keseluruhan elemen dalam konteks negara. Definisi lain terkait kebijakan publik yang paling terkenal yakni definisi oleh Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2016) dimana berdasarkan interpretasinya kebijakan publik dimaknai sebagai "*what governments choose to do or not to do.*" Dalam konteks ini, terdapat batasan bahwa tindakan tersebut dapat berbentuk tindakan yang dilakukan secara nyata maupun pilihan untuk tidak melakukan apapun.

Pemberian makna terhadap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Eystone dan Dye masih sangat luas dan abstrak sehingga muncul pendapat baru dari Chandler dan Plano (dalam Keban, 2019) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu usaha untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara strategis guna memecahkan masalah baik itu masalah publik maupun masalah pemerintah. Dalam pandangan ini kebijakan publik menekankan pada adanya bentuk intervensi pemerintah yang bersifat kontinu untuk menyelesaikan permasalahan melalui upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan pada pendapat para ahli yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan

mengorganisasikan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memecahkan suatu persoalan khusus yang dialami oleh publik.

Kebijakan publik sejatinya tidak dapat terbentuk begitu saja melainkan harus melalui suatu proses yang kompleks dan rasional. Suharno (2013) memaknai proses kebijakan sebagai sebuah rangkaian dari aktivitas intelektual yang dilakukan dalam kerangka kegiatan yang sifatnya politis. Proses kebijakan seringkali diwarnai dengan adanya aktivitas politis yang menunjukkan adanya pengaruh besar dari kekuasaan dan kepentingan dalam adopsi kebijakan bahkan implementasi kebijakan. Sedangkan kegiatan perumusan masalah, forecasting, monitoring dan evaluasi merupakan bentuk dari aktivitas yang menggambarkan proses bersifat intelektual. Adapun proses kebijakan menurut William N. Dunn (dalam Suharno, 2013) dibagi menjadi lima tahapan yang terdiri atas:

1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan (*Agenda Setting*)

Tahapan ini menekankan pada peran legislator untuk memilah masalah publik yang dapat diangkat menjadi agenda kebijakan sehingga dapat membentuk kebijakan yang tepat.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas dan dipecahkan dengan berbagai alternatif. Pada tahap ini alternatif yang ada akan diuji dan dibandingkan sehingga diperoleh alternatif terbaik yang akan disusun menjadi sebuah kebijakan publik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Alternatif terbaik yang telah didapatkan kemudian akan diadopsi dan dirumuskan menjadi kebijakan publik yang sebelumnya hal ini telah disepakati oleh *policy maker*.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dirumuskan harus segera diimplementasikan di mana pada tahapan ini menekankan pada pelaksanaan kebijakan melalui pelaksanaan program maupun kegiatan di lapangan yang memerlukan dukungan dari berbagai jenis sumber daya.

5. Tahap Penilaian Kebijakan (Evaluasi)

Penekanan tahapan terdapat pada penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengatasi masalah.

Salah satu tahapan penting dan tidak dapat dilewatkan dari kesatuan proses kebijakan publik adalah formulasi kebijakan. Anderson (1975) melalui buku *Public Policy-Making* menyatakan bahwa formulasi kebijakan bersangkutan erat dengan upaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana alternatif atas suatu kebijakan dapat disepakati untuk mengatasi masalah-masalah. Penekanan pada formulasi kebijakan yakni suatu proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan khusus yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan utama yang dilakukan pada proses ini ialah memilih alternatif-alternatif guna menangani suatu masalah kebijakan.

Formulasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting sebab mampu memengaruhi hasil dari kebijakan yang dibuat. Apabila kebijakan tidak diformulasikan secara komprehensif maka hasil kebijakan tidak akan mampu untuk mencapai sasaran secara optimal (Deni, 2023). Iriawan (2024) menyatakan bahwa formulasi kebijakan dalam konteks kebijakan publik merupakan memiliki fungsi untuk merumuskan batasan dan ruang lingkup kebijakan sehingga dapat dirancang suatu kebijakan yang solutif, relevan dan efektif. Oleh sebab itu, formulasi kebijakan menjadi tahap awal proses kebijakan yang harus dilakukan dengan teliti dan penuh kehati-hatian.

Merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Alaslan (2021) formulasi kebijakan merupakan suatu proses dirumuskannya suatu kebijakan yang melibatkan adanya analisis kebijakan, pengumpulan data, konsultasi dengan berbagai pihak serta pengambilan keputusan. Formulasi kebijakan publik harus didasarkan pada data serta informasi yang valid dan akurat dengan disertai analisis yang mendalam (Deni, 2023). Untuk itu, diperlukan kajian secara akademis dan konsultasi yang dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait termasuk juga dengan berkonsultasi atau melibatkan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan tersebut.

Salah satu konsultasi yang dilakukan pada tahap formulasi kebijakan ialah konsultasi publik yang merupakan sebuah prosedur di mana pemerintah mencari masukan umpan balik dan pendapat dari publik mengenai suatu permasalahan atau alternatif kebijakan yang diusulkan sehingga perspektif dari publik mampu direpresentasikan dalam sebuah kebijakan (Xiang, 2024). Konsultasi publik tidak terbatas pada komunikasi dialogis untuk mencapai suatu kesepakatan terkait

alternatif kebijakan tetapi juga berkaitan erat dengan pelibatan publik dalam proses pembentukan kebijakan sehingga kebijakan yang terbentuk mampu merepresentasikan kepentingan publik itu sendiri.

Kepentingan publik dapat diartikulasikan, diagregasikan serta diakomodasi dalam sebuah kebijakan publik melalui adanya partisipasi (Keban, 2019). Hal ini yang membuat konsultasi publik melalui adanya partisipasi dalam formulasi kebijakan menjadi penting. Selain itu, Reianu dan Dobra (2024) menjelaskan bahwa konsultasi publik memiliki peran krusial sebab mampu meningkatkan nilai nilai demokrasi dan legitimasi antara publik dengan pemerintah dalam proses formulasi kebijakan yang inklusif, meningkatkan transparansi serta mampu memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan koneksi antar warga negara.

Partisipasi publik yang luas pada konsultasi publik mampu meningkatkan efektivitas dengan membuka berbagi perspektif yang komprehensif dalam melihat suatu masalah. Melalui pendekatan yang menekankan pada pentingnya inklusivitas, maka mampu dibentuk suatu kebijakan yang berpihak pada publik dan membentuk suatu proses kebijakan yang demokratis (Bunea et.al, 2025). Konsultasi publik memberikan pengaruh yang signifikan pada formulasi kebijakan tetapi pemerintah seringkali menggunakan strategi untuk menghindari tuntutan masyarakat sehingga konsultasi publik berjalan dengan rumit dan lebih kompleks (Choi and Wong, 2024). Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu memobilisasi partisipasi warga negara sehingga proses konsultasi publik dalam formulasi kebijakan mampu berjalan secara demokratis.

Dalam bukunya, Deni (2023) memaparkan bahwa dinamika perubahan sosial dan juga teknologi menghadirkan dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik yakni memunculkan tuntutan baru dari masyarakat untuk mendorong adanya inovasi kebijakan, peningkatan partisipasi publik dalam proses kebijakan dan juga transparansi dalam proses kebijakan. Kondisi ini turut berdampak pada konsultasi publik yang terjadi pada tahap formulasi kebijakan yang dituntut untuk menjadi lebih partisipatif dan efisien sehingga mampu mewujudkan proses formulasi kebijakan yang deliberatif dan transparan.

Berkenaan dengan aksesibilitas, penyelenggaraan konsultasi publik harus mampu menjangkau banyak partisipan sehingga diperlukan adanya optimalisasi penggunaan media komunikasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas publik terhadap partisipasi dalam konsultasi publik. Metode pelaksanaan konsultasi publik menjadi berkembang dengan adanya platform digital yang penggunaannya meningkat untuk memfasilitasi keterlibatan publik yang lebih luas (Reianu dan Dobra, 2024). Platform digital tidak hanya mampu meningkatkan aksesibilitas publik terhadap partisipasi dalam konsultasi publik tetapi juga mampu untuk meningkatkan jangkauan partisipasi yang melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga menjadi semakin inklusif.

1.5.5 Partisipasi Publik

Salah satu hal yang tidak dapat terpisahkan dari proses kebijakan adalah partisipasi publik. Menurut Quick & Bryson (2022) yang disebut sebagai partisipasi

publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) dalam mengambil keputusan mengenai suatu kebijakan, rencana maupun program yang menjadi kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Isbandi Rukminto (2001) memberikan pendefinisian yang berbeda dan lebih terperinci mengenai partisipasi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa partisipasi publik adalah suatu bentuk keikutsertaan masyarakat pada proses pengidentifikasian potensi yang ada di lingkungannya, proses pengambilan keputusan atas alternatif dari masalah yang dihadapi pelaksanaan alternatif sebagai upaya untuk mengatasi masalah serta keterlibatan dalam proses evaluasi.

Stiglitz, (2002) memiliki keyakinan yang optimis bawa partisipasi merupakan suatu cara yang efektif untuk melakukan transformasi pembangunan masyarakat yang lebih luas. Dalam pandangan Stiglitz, ketika seorang individu menyalurkan pendapat yang mengarah pada perubahan maka terdapat potensi yang besar pendapat tersebut akan diterima dan memungkinkan terjadinya sebuah perubahan. Sehingga disini partisipasi tidak hanya sekedar proses ketika individu melakukan keikutsertaan aktif dalam mengutarakan pendapatnya maupun mendengarkan pendapat dari orang lain tetapi juga melakukan peran tersebut yang mengarah pada suatu perubahan yang ingin dicapai.

Noer (2022) mengungkapkan pandangannya terhadap partisipasi publik dengan mengamati partisipasi publik dari dua perspektif yang berbeda. Apabila dipandang melalui perspektif publik maka partisipasi publik mampu menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan pengaruh dari publik terhadap keputusan para

pemangku kepentingan yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif pemerintah maka partisipasi publik menyediakan suatu sarana untuk mendiskusikan isu dan permasalahan yang sedang terjadi hingga menemukan suatu konklusi maupun rekomendasi terkait permasalahan yang terjadi. Pandangan yang memberi gambaran bagaimana partisipasi dilihat dari dua perspektif yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya suatu koneksi yang dibangun oleh partisipasi sehingga mampu menjembatani hubungan antara pemerintah dengan publik. Lebih dari itu, partisipasi turut menjadi suatu cara untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan dialog yang melibatkan masyarakat sebelum merumuskan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan dari masyarakat itu sendiri.

Partisipasi publik mencerminkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan negara yang diwujudkan dalam berbagai bentuk keikutsertaan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor kunci yang mempengaruhi kependudukan mereka dan menjadi suatu instrumen yang mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik (Gaventa dan Valderama dalam Dwiningrum, 2011). Pendapat Conyers et al. (1991) memperkuat hal tersebut dengan menekankan bahwa terdapat tiga poin utama mengapa partisipasi publik menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. (1) Partisipasi publik merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan kondisi dan sikap dari masyarakat setempat. Tanpa adanya hal tersebut maka program pembangunan akan gagal dilaksanakan. (2) Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta program pembangunan

meningkat ketika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dari program pembangunan tersebut. (3) Partisipasi publik bukan hanya sebagai suatu alat melainkan suatu pemenuhan atas hak demokrasi yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Demokrasi dalam suatu negara tidak akan berjalan tanpa partisipasi publik. Terdapat banyak alasan yang menunjukkan betapa pentingnya tingkat partisipasi publik dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Dalam bukunya, Denhardt dan Denhart (2007) berargumen bahwa setidaknya terdapat tiga alasan mendasar mengapa partisipasi publik menjadi penting dalam suatu lingkungan masyarakat yang demokratis. Pertama, melalui partisipasi publik yang baik maka akan dicapai suatu hasil atau produk politik yang berkualitas yang mencerminkan penilaian masyarakat terhadap suatu isu. Kedua, partisipasi publik penting untuk mencapai kesepakatan yang mampu memenuhi kepentingan sebagian besar warga negara serta menghindari penyelewengan kepentingan warga negara oleh pemerintah. Ketiga, partisipasi publik dapat meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.

Studi yang dilakukan oleh Campbell (2023) memperkuat argumen yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhart mengenai alasan mendasar mengapa partisipasi publik menjadi sangat penting dalam suatu lingkup penyelenggaraan demokrasi di sebuah negara. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan yang dibentuk menggunakan pendekatan yang partisipatif dengan memperhatikan keterlibatan dari masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu model pendekatan yang lebih

partisipatif dalam penyelenggaraan negara perlu ditingkatkan dan disusun sedemikian rupa agar mampu melibatkan publik secara masif sehingga kebijakan yang dibuat tidak berorientasi kepada kepentingan pribadi melainkan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Peters, 1996).

Titik ideal dari suatu partisipasi publik dapat memiliki berbagai bentuk dan unsur. Emmett S. Redford (dalam Denhardt dan Denhart (2007) memiliki argumen tersendiri terkait kondisi ideal dari suatu partisipasi publik dengan mengungkapkan bahwa partisipasi publik seharusnya memuat unsur-unsur yang mendasar. Unsur tersebut terdiri atas akses untuk memperoleh informasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pendidikan, pemerintah yang terbuka serta adanya komunikasi dan diskusi yang bebas, terdapat akses langsung maupun tidak langsung terhadap suatu forum partisipasi, adanya kemampuan untuk membuka diskusi mengenai berbagai macam isu dalam suatu forum diskusi publik, terdapat kemampuan untuk menegaskan suatu klaim maupun argumen tanpa takut mendapatkan balasan yang bersifat memaksa serta kemampuan peserta untuk mempertimbangkan klaim atau argumen yang telah diungkapkan dalam diskusi partisipatif yang telah dilakukan.

1.5.6 *Public Sphere*

Jurgen Habermas seorang sosiolog yang menganut Mazhab Frankfurt mengemukakan gagasan yang begitu kritis terkait kebebasan setiap individu dalam berpartisipasi melalui adanya ruang publik atau yang disebut sebagai *public sphere*. Konteks ruang publik yang dibahas oleh Habermas bukan merupakan ruang publik dalam bentuk fisik tetapi suatu ruang sosial yang dibangun atas dasar tindakan

komunikatif masyarakat. Ruang publik di sini bukan pula merujuk pada suatu institusi maupun organisasi melainkan suatu tempat bagi warga negara untuk berpartisipasi dan terlibat dalam dialog terbuka mengenai isu-isu publik (Hardiman, 2010). Secara sederhana, Habermas memberikan definisi *public sphere* sebagai suatu ranah kehidupan sosial manusia yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan dari publik sehingga memungkinkan terbentuknya suatu kesepakatan kolektif.

Keberadaan *public sphere* atau ruang publik memungkinkan adanya mediasi antara pemerintah dengan masyarakat yang memungkinkan terbentuknya kontrol sosial dan politik dari masyarakat kepada pemerintah. Warga negara atau publik merupakan aktor utama yang berkontribusi dalam kegiatan dalam *public sphere*. *Public sphere* ini menjadi suatu ruang komunikasi antar warga negara untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan melalui komunikasi sosial yang rasional. Semakin terbuka *public sphere* maka potensi terbentuknya sebuah perhimpunan masyarakat yang bebas dari tekanan dan pertukaran gagasan menjadi semakin besar dan mendukung terwujudnya demokratisasi masyarakat (Hardiman, 2010).

Pada konsep ruang publik, Jurgen Habermas menawarkan penggunaan suatu konsep tindakan komunikatif yang tidak lagi berpijak pada konsepsi akal budi subjek melainkan mulai berubah ke arah akal budi yang bersifat intersubjek. Menurut Habermas model ini menjadi landasan yang penting dalam rangka mencapai suatu pemahaman bersama mengenai situasi yang tengah dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat. Format awal dari ruang publik yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas adalah ruang publik yang terdiri atas kaum borjuis yang berkumpul dan berdialog mengenai otoritas negara pada masa itu. Kemudian pada

tahun 1680 hingga tahun 1730 mulai bermunculan kedai-kedai kopi di Inggris. Sementara itu, pada saat yang sama tumbuh dengan pesat salon-salon populer di Perancis (Habermas, 2012). Salon dan kedai kopi inilah yang menjadi cikal bakal institusi ruang publik yang digunakan oleh para borjuis dan kaum intelektual mulai berdialog dan membentuk suatu opini yang disepakati bersama-sama.

Berangkat dari pemikiran Habermas mengenai *public sphere* atau ruang publik, Asri (2020) mencoba untuk menguraikan konsep dari ruang publik yang digagas oleh Habermas tersebut. Dalam penjelasannya mengenai konsep ruang publik ini setidaknya memuat lima hal yang perlu digarisbawahi. (1) ruang publik merupakan suatu ruang sosial yang bebas dari segala bentuk dominasi sehingga terdapat suatu jaminan bagi setiap individu untuk berkumpul dan mengutarakan gagasan mereka secara bebas dan terbuka. (2) bagian paling penting dari ruang publik adalah keberadaan informasi yang merupakan bentuk manifestasi dari ide dan gagasan yang telah diungkapkan individu melalui argumen yang secara eksplisit menjelaskan posisi dan pandangannya terhadap suatu permasalahan. (3) ruang publik menjadi tempat terbentuknya opini publik yang bersumber dari gagasan masyarakat yang bebas tekanan dan bebas kendali dari pemerintah. (4) ruang publik menjadi jembatan interaksi antar individu dalam masyarakat yang bebas sehingga tidak ada perlakuan istimewa (*privilege*) yang diterima oleh individu maupun kelompok tertentu karena dalam ruang publik semua partisipan dianggap setara dalam proses diskusi dan berwacana. (5) Ruang publik menjadi ruang yang independen dan diskusi rasional yang ada di dalamnya tidak diarahkan

pada kepentingan tertentu melainkan menjadi ruang yang murni terbuka bagi siapa saja sehingga mampu membentuk opini publik yang sehat.

Pada prinsipnya, *public sphere* merupakan suatu area yang memediasi interaksi dan pertukaran gagasan mengenai isu-isu publik secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. *Public sphere* idealnya juga bebas dari intervensi dan tekanan dari pihak-pihak tertentu sehingga mampu terbentuk opini publik yang murni bersumber dari diskusi kritis yang dilakukan oleh publik itu sendiri. *Public sphere* menjadi suatu landasan penting guna mewujudkan adanya demokrasi yang deliberatif. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, Cohen & Fung (2021) mendalami pemikiran tersebut dan mengemukakan bahwa diperlukan serangkaian hak dan peluang untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan dalam berkomunikasi melalui ruang publik. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut maka kemampuan partisipasi publik yang lebih luas yang terjalin melalui *public sphere* lebih mudah untuk dicapai. Rangkaian antara hak dan peluang tersebut meliputi:

1. *Rights* adalah hak dasar di mana setiap orang berhak untuk berekspresi dan juga berserikat. Melalui adanya kebebasan untuk berekspresi ini maka individu yang bergabung dalam ruang publik mampu melakukan partisipasi aktif dan membangun demokrasi yang lebih deliberatif.
2. *Expression* merupakan kesempatan dimana dalam konteks *public sphere* setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya mengenai isu yang menjadi perhatian khalayak umum.

3. *Access* yang berarti bahwa semua orang memiliki akses yang setara untuk mendapatkan informasi serta bergabung untuk berdiskusi terkait masalah-masalah yang menjadi perhatian publik dalam *public sphere* yang terbentuk.
4. *Diversity* yang artinya dalam ruang publik idealnya terdapat pandangan yang beragam dan komprehensif dalam mengkritisi suatu isu.
5. *Communicative power* adalah suatu kapasitas untuk melakukan suatu tindakan kolektif yang berkelanjutan dimana kondisi ini dihasilkan melalui sebuah diskusi terbuka yang eksploratif namun tetap saling menghormati.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang semakin kontemporer para ahli mulai merancang tipologi dari ruang publik. Habermas sebagai pencetus teori ruang publik ini mendeskripsikan secara lebih lanjut pemikiran mengenai tipologi ruang publik tersebut dan membaginya menjadi tiga kategori (Maia, 2007). Tipologi ruang publik yang pertama adalah ruang publik episode (*episodic public sphere*). Ruang publik episode didirikan dengan adanya pertukaran argumentasi yang tidak begitu padat yang hanya melibatkan sedikit partisipan dan umumnya mencakup sudut pandang yang lebih sedikit. Ruang publik episode ini lekat hubungannya dengan percakapan sehari-hari yang sering dilakukan dengan keluarga, kolega atau kelompok-kelompok lain yang bersifat informal. Menurut (Maia, 2007), melalui percakapan sehari-hari yang dilakukan maka individu mampu mengkonseptualisasikan kembali isu ataupun masalah publik sebelum memutuskan kebijakan mana yang mereka inginkan ataupun merumuskan sebuah rekomendasi sebagai hasil dari dialog yang telah dilakukan

atau dengan kata lain individu dapat memahami secara lebih jelas apa yang diinginkan maupun dibutuhkan baik secara individu maupun secara kolektif.

Tipologi kedua dari ruang publik adalah *public sphere of organized presence* atau ruang publik yang terbentuk dengan kehadiran yang terorganisasi. Tipologi ruang publik ini merujuk pada berbagai jenis pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang tertentu yang telah disusun secara sengaja dan terorganisasi dimana dalam pertemuan tersebut dapat terjadi suatu dialog maupun komunikasi yang berkembang sesuai dengan prosedur formal hingga tercapai suatu kesepakatan. Secara sederhana tipologi ini dapat dilihat melalui diskusi kolektif yang sengaja dilakukan untuk membahas suatu isu ataupun permasalahan oleh suatu kelompok tertentu. Sedangkan tipologi ruang publik yang ketiga adalah ruang publik abstrak (*abstract public sphere*) atau yang mengacu pada lingkaran produksi media yang menghubungkan hal-hal tunggal yang tersebar secara luas dan menghubungkannya dengan pendengar, pembaca ataupun penonton yang ada di sisi lain. Ruang publik abstrak memiliki struktur yang impersonal dan asimetris dalam komunikasi massa. Ruang publik dengan tipe abstrak pada situasi tertentu cenderung menguntungkan memiliki kemampuan untuk membangkitkan opini publik yang matang.

Membandingkan kondisi ruang publik pada abad 21 dengan ruang publik yang lahir pada abad 18 merupakan hal yang kurang pantas untuk dilakukan sebab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan suatu perubahan yang besar terhadap keberadaan ruang publik di masa sekarang (Khan et al., 2012). Adanya teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya membantu memenuhi syarat struktural terbentuknya ruang publik transnasional tetapi juga

memberikan kecepatan, cakupan dan jaringan yang lebih luas dari ruang publik konvensional. Kini keberadaan teknologi dan media menjadi komponen vital bagi terselenggaranya diskursus ruang publik pada era modern yang membentuk jaringan ruang publik yang luas melalui jaringan komunikasi berskala global yang mempercepat terbentuknya dialog publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam masyarakat yang lebih modern seperti saat ini media dan juga internet merupakan suatu bentuk komunikasi publik informal yang terorganisir dan penting untuk menginisiasi terbentuknya suatu ruang publik yang demokratis. Perkembangan media dan juga digitalisasi turut mempengaruhi perkembangan *public sphere* dimana kini internet menyediakan banyak jalan untuk berekspresi dan cara-cara baru untuk mempengaruhi politik dan menjadi aktif secara politik (Papacharissi, 2002). Keberadaan saluran-saluran tambahan seperti halnya internet dan media massa memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi sehingga mendorong terjadinya diskusi yang lebih demokratis dan menanamkan kesadaran kolektif yang dimaknai sebagai pembentukan opini publik. Fuchs (2021) mengungkapkan bahwa transisi ini membentuk perkembangan *public sphere* yang bertransformasi menjadi *digital public sphere* yaitu sebuah dimensi dari ruang publik dengan pengetahuan yang dipublikasikan dalam format digital dan menjadi bahan perdebatan publik secara kritis melalui dunia maya.

Salah satu aspek yang melekat pada ruang publik baru merujuk pada adanya platform digital yang semakin relevan dengan dinamika dan perkembangan dari opini publik yang berkembang di masyarakat dimana proses “platformisasi” masyarakat kontemporer menjadi masyarakat digital telah membawa transformasi

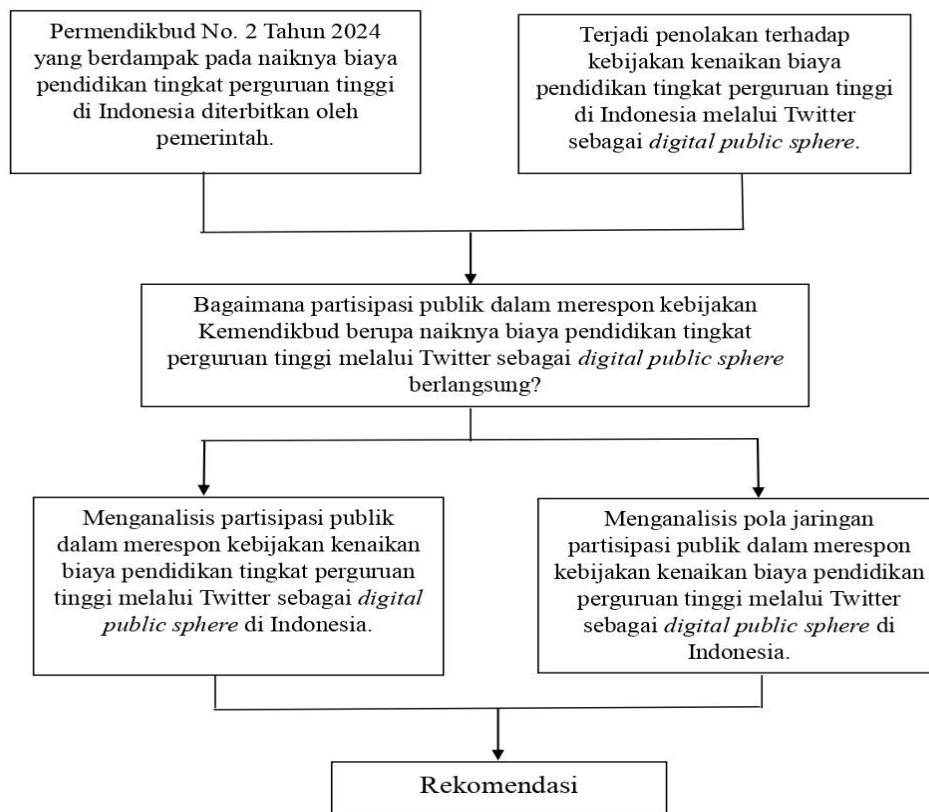
pada ruang publik menuju ruang publik baru yang terdigitalisasi (De Blasio et al., 2020). Transformasi ruang publik hingga mampu berubah menjadi ruang publik digital atau *digital public sphere* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh internet. Internet memunculkan banyak *platform* digital yang mulai mendominasi wacana publik, membentuk akses yang lebih luas serta lebih cepat terhadap informasi dan juga konten-konten politik yang berdampak pada semakin luasnya kebebasan berekspresi (Smyrnaio & Baisnée, 2023).

Tidak dapat dipungkiri bahwa internet memberikan pengaruh positif yang begitu besar terhadap perkembangan ruang publik namun di lain sisi internet juga memberikan suatu dampak tersendiri bagi keberlangsungan diskursus di ruang publik itu sendiri. (Ubayasiri, 2006) Memberikan kritik bahwa anonimitas yang digunakan oleh para pengguna internet ketika sedang berdialog di ruang publik memberikan kecenderungan menuju tirani massal yang anarkis dan mampu merusak pondasi dari ruang publik sekaligus berdampak pada kemampuan ruang publik untuk menghasilkan opini publik yang positif sehingga dibutuhkan suatu kontrol terhadap dialog yang berlangsung. Namun kontrol ini mampu menentang prinsip kebebasan yang sejatinya melekat pada internet sebagai ruang publik.

Teori *public sphere* mampu memberikan gambaran terkait penggunaan sosial media sebagai suatu wadah yang mengakomodir partisipasi publik dan pembentukan opini publik. Di samping itu, teori ini juga mampu menjadi dasar penjelasan bagaimana suatu tindakan kolektif yang dilakukan oleh publik dalam membentuk opini publik dapat mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah serta menjadi cerminan dari berjalannya demokrasi. Melalui basis

pemikirannya, teori *public sphere* yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas ini mampu menjelaskan bagian terpenting dari partisipasi warga negara yang mampu mempengaruhi suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah apabila telah tercapai suatu kesepakatan kolektif berupa opini publik yang terus menerus disampaikan melalui ruang publik termasuk media sosial yang saat ini berperan sebagai *digital public sphere* atau ruang publik yang telah terdigitalisasi.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.7. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Olah Data Peneliti (2024)

1.7 Operasionalisasi Konsep

Beberapa definisi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah segala bentuk tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber daya yang tersedia secara strategis dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

2. **Public Sphere**

Public sphere merupakan sebuah ruang dalam kehidupan sosial yang bebas tekanan, dapat diakses oleh siapa saja yang didalamnya terjadi kegiatan pertukaran gagasan melalui diskusi rasional yang membahas persoalan-persoalan publik dan memungkinkan terbentuknya suatu opini publik atau tindakan kolektif yang diinisiasi oleh publik. Dalam perkembangannya, *public sphere* bertransformasi menjadi *digital public sphere* karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin modern. *Digital public sphere* adalah suatu ruang dengan fungsi yang sama dengan ruang publik tradisional namun segala bentuk kegiatan diskusi dan wacana publik dalam ruang tersebut dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital.

3. **Public Participation**

Public participation atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai partisipasi publik merupakan keterlibatan masyarakat yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses dan tahapan pengambilan

keputusan yang menjembatani komunikasi antara publik dengan pemerintah sehingga mampu menghasilkan suatu keputusan pemerintah yang mampu mengakomodasi kepentingan publik itu sendiri.

Selain dijelaskan mengenai definisi konsep, disajikan pula operasionalisasi konsep sebagaimana yang tercantum dalam tabel fenomena penelitian berikut:

Tabel 1.3. Fenomena Penelitian

Fokus	Fenomena	Sub Fenomena	Metode Pengumpulan Data
Partisipasi Publik dalam Merespon Kebijakan Kenaikan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia	Forum partisipasi	1. Bentuk forum 2. Kapasitas forum 3. Potensi intervensi 4. Pembentukan opini publik	Wawancara dengan pengguna aktif Twitter Observasi pada media sosial Twitter
	Akses Untuk Menyampaikan Aspirasi	5. Akses terhadap forum 6. Akses terhadap informasi 7. Akses terhadap jaringan partisipasi	Wawancara dengan pengguna aktif Twitter Observasi pada media sosial Twitter
	Keterlibatan Dalam Proses Partisipasi	8. Kemampuan berinteraksi 9. Kemampuan terlibat dalam diskusi 10. Kemampuan terlibat dalam pembentukan opini publik	Wawancara dengan pengguna aktif Twitter Observasi pada media sosial Twitter
Pola Jaringan Partisipasi	Pola Jaringan Partisipasi	11. Gambaran pola jaringan	<i>Data crawling</i> dari media sosial

Publik dalam Merespon Kebijakan Kenaikan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi Melalui Aplikasi Twitter	Publik	partisipasi publik 12. Struktur jaringan partisipasi publik	Twitter
	Aktor-Aktor yang Berpengaruh Dalam Jaringan	13. <i>Degree centrality</i> 14. <i>Closeness centrality</i> 15. <i>Betweenness centrality</i> 16. <i>Eigenvector centrality</i>	<i>Data crawling</i> dari media sosial Twitter

Sumber: Olah Data Peneliti (2024)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian yaitu "*Digital Public Sphere* dalam Merespon Kebijakan Kenaikan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi Melalui Aplikasi Twitter di Indonesia", maka pada penelitian ini menggunakan metode campuran atau *mix method*. Creswell (2014) memahami pendekatan *mix method* sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan antara peneliti dengan tipe kualitatif dengan penelitian bertipe kuantitatif. Selanjutnya, Sugiyono (2018) berpendapat bahwa kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif pada penelitian *mix method* membuat metode ini memiliki keunggulan yakni data yang diperoleh lebih luas, mendalam dan komprehensif.

Penggunaan pendekatan tersebut berupaya untuk memberikan gambaran paling lengkap dan akurat mengenai fenomena yang diteliti yakni berkaitan dengan partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tinggi melalui aplikasi Twitter sebagai *digital public sphere*. Penggunaan *mix method* dalam melakukan penelitian didasarkan pada kelebihan dari metode tersebut yang

mampu melengkapi kekurangan dari metode kualitatif maupun kuantitatif sehingga kombinasi ini mampu memperoleh hasil paling baik yang mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara presisi.

Dalam penerapan metode campuran atau *mix method* pada penelitian, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi terkait partisipasi publik yang dilakukan oleh informan yang aktif dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi melalui media sosial Twitter. Data yang telah diperoleh melalui wawancara kemudian diolah dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan, pendekatan kuantitatif diaplikasikan pada proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder dari aplikasi Twitter untuk menggambarkan pola jaringan partisipasi serta menentukan aktor-aktor yang memiliki pengaruh dominan dalam jaringan partisipasi tersebut melalui pengujian kuantitatif dengan bantuan alat analisis berupa Gephi.

1.8.2 Situs Penelitian

Pada sebuah penelitian terdapat unsur berupa situs penelitian. Situs penelitian merupakan letak sesungguhnya dimana peneliti melaksanakan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Twitter sebagai salah satu media sosial yang kini umum digunakan oleh masyarakat dipilih sebagai lokus penelitian. Twitter dipilih sebagai lokus penelitian karena keunggulan yang dimiliki aplikasi tersebut sebagai suatu situs jejaring sosial dengan persebaran informasi *real-time* yang cepat yang memungkinkan untuk mendapatkan data dalam jumlah besar mengenai suatu topik diskusi.

Platform media sosial yang berdiri sejak tahun 2000-an ini telah berkembang menjadi salah satu media yang paling sering digunakan untuk melakukan berbagai diskusi interaktif di dunia maya. Meskipun telah mengalami pergantian *branding* dan berubah nama menjadi X, namun hingga hari ini mayoritas pengguna tetap menggunakan istilah Twitter untuk menyebut nama aplikasi X tersebut. Istilah Twitter kemudian digunakan untuk menyebut media sosial X sebagai situs penelitian dalam penelitian ini.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian diartikan sebagai benda maupun manusia yang mampu memberikan informasi agar peneliti mampu menjawab rumusan masalah. Subjek penelitian berperan sebagai sumber informasi yang mampu memberikan data relevan terkait masalah penelitian. Subjek penelitian ini adalah unggahan atau *tweet* dari para pengguna Twitter yang mengandung kata kunci "UKT naik OR Kenaikan UKT" yang dibatasi mulai tanggal 1 April 2024 hingga 31 Mei 2024. Kata kunci tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan fokus permasalahan yakni kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi dan memberikan batasan ruang lingkup terhadap permasalahan yang diteliti.

Pemilik akun atau pengguna Twitter yang pernah melakukan pengunggahan konten dengan kata kunci yang dimaksud maupun bentuk partisipasi lain dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi turut menjadi subjek dari penelitian ini. Dalam menentukan subjek yang akan dijadikan

sebagai narasumber digunakan metode *purposive sampling*. Narasumber dipilih berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

1.8.4 Jenis Data

a. Data Kualitatif

Data kualitatif bersifat deskriptif berupa gejala, kejadian, dan peristiwa yang dianalisis untuk diklasifikasikan dalam beberapa kategori (Kusumastuti et al., 2019). Dalam penelitian ini, data berjenis kualitatif berupa tindakan dan perkataan yang diungkapkan oleh informan yakni para pengguna aktif Twitter yang berpartisipasi dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan tingkat perguruan tinggi. Selain itu, data kualitatif juga berupa informasi yang berasal dari sumber-sumber sekunder berupa artikel jurnal, artikel berita, buku, dokumentasi maupun publikasi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

b. Data Kuantitatif

Jenis data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dan dihitung. Data kuantitatif disimbolkan menggunakan satuan angka. Pada penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah jumlah dan frekuensi cuitan yang didapatkan melalui Twitter dalam rentang waktu dan kata kunci yang telah ditentukan. Hasil dari data yang telah diambil dari aplikasi Twitter atau dataset akan berbentuk tabulasi kuantitatif yang selanjutnya akan diolah melalui proses analisis data.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merujuk pada dari mana data dan informasi didapatkan. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data dapat berasal dari individu, kelompok, dokumen, peristiwa, maupun hal lain yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui tangan pertama. Data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang aktif melakukan partisipasi publik terkait kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi melalui media sosial Twitter menjadi data primer yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data dan informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari *tweet* hasil *crawling* pada aplikasi Twitter. Data sekunder yang lain yang dikutip dalam penelitian ini dapat ditemukan melalui berbagai media seperti internet buku artikel jurnal ilmiah maupun dokumen lain yang masih memiliki relevansi dengan *public sphere* dan kenaikan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagai topik utama yang diteliti.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode *data crawling* dari aplikasi Twitter dengan menggunakan bantuan Google Collaboration dengan bahasa pemrograman Python. Metode *data crawling* merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui *web crawling* guna mendapatkan dataset yang relevan dan mampu merepresentasikan subjek penelitian yang tentunya sesuai dengan fokus permasalahan (Kurnia et al., 2021).

Melalui metode ini, peneliti dapat lebih mudah melakukan proses pengumpulan data yang diperoleh secara otomatis berdasarkan rentang waktu dan kata kunci yang diinginkan. Guna mempermudah pengambilan data maka dilakukan pembatasan waktu. *Tweet* harus berada dalam rentang waktu 1 April 2024 hingga 31 Mei 2024. Selain itu, untuk mempermudah melakukan *crawling* maka ditetapkan kata kunci yakni “UKT naik OR Kenaikan UKT” sehingga dapat menghimpun dataset berupa *tweet* dari pengguna Twitter yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh penelitian ini yakni adanya peningkatan biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia.

Guna mendapatkan data yang lengkap maka digunakan pula teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan terhadap para pengguna aplikasi Twitter yang terlibat partisipasi secara aktif dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode wawancara semi-terstruktur yang dimaksudkan untuk

menggali informasi secara lebih terbuka dan mendalam dari narasumber. Digunakan pula teknik observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data berbentuk visual yang mampu mendukung dan melengkapi data-data yang telah didapatkan dengan dua teknik sebelumnya.

1.8.7 Analisis Dan Interpretasi Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif. Peran besar metode kuantitatif dalam penelitian ini salah satunya terletak pada teknik analisis dan interpretasi data yang menggunakan metode SNA. SNA atau *Social Network Analysis* digunakan sebagai metode analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu metode analisis data melalui pemetaan suatu jaringan sosial yang sebelumnya telah terbentuk (Bandyopadhyay et al., 2011). SNA dipilih sebagai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebab SNA tidak menghasilkan asumsi-asumsi yang berpotensi menimbulkan kesalahan analisis dalam menentukan aktor-aktor yang terlibat dalam partisipasi publik melalui Twitter sebagai *digital public sphere*. Berdasarkan pada penggunaan basis teori graf untuk mengeksplorasi suatu jaringan, SNA menjadi suatu alat analisis yang baik untuk melakukan identifikasi suatu jaringan komunikasi beserta dinamikanya baik itu pada jaringan komunikasi dengan partisipasi kelompok besar maupun kecil (Carrington et al., 2009).

Analisis data dibagi menjadi beberapa tahapan yang dimulai dengan melakukan pengumpulan data yang dibantu menggunakan *software* Google

Collaboration. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *data crawling* guna menghimpun *tweet* masyarakat yang sesuai dengan kata kunci. Data-data yang terkumpul akan ditabulasi secara otomatis membentuk dataset yang terdiri atas daftar aktor (*node*), relasi antar aktor (*edges*) dan juga keterangan penunjang lain. Selanjutnya, dilakukan *data cleaning* untuk memilah data yang tidak relevan.

Tahapan analisis data dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap aktor yang terdapat pada jaringan partisipasi publik melalui Twitter sebagai digital *public sphere* yang meliputi *degree centrality*, *closeness centrality*, *eigenvector centrality*, dan *betweenness centrality*. Tahap analisis ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai aktor-aktor yang berpengaruh dalam jaringan hingga pola-pola yang terbentuk dalam jaringan partisipasi publik tersebut. Nilai-nilai dari *degree centrality*, *closeness centrality*, *eigenvector centrality*, dan *betweenness centrality* diperoleh ketika melakukan analisis data yang dilaksanakan dengan memakai perangkat lunak Gephi versi 0.10.

Masih dengan alat yang sama, analisis dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi terhadap jaringan partisipasi publik yang akan menghasilkan analisis jaringan partisipasi berupa diagram. Diagram tersebut memuat gambaran mengenai aktor utama yang terlibat, jarak antar aktor, bentuk hubungan yang terjalin, hingga pola interaksi dan kecenderungan interaksi yang terjadi. Tahapan analisis ini bertujuan untuk menjelaskan pola interaksi yang terjadi pada aktor-aktor yang terlibat partisipasi sehingga mampu mempengaruhi isu yang menjadi fokus pembahasan. Analisis menggunakan Gephi ini juga memberikan visualisasi atau interpretasi terhadap data yang telah diolah sehingga dari pola hubungan pada

jaringan partisipasi publik dalam merespon kebijakan kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi menjadi lebih mudah untuk dipahami.

Teknik analisis data kuantitatif tersebut digunakan untuk melengkapi hasil analisis data hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif tersebut dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara, reduksi data dan penyajian data (Creswell et.al, 2015). Tahap akhir dari analisis data yang dilakukan adalah melakukan penarikan kesimpulan. Hasil analisis secara kualitatif dikombinasikan dengan hasil analisis dan interpretasi data kuantitatif untuk melakukan penarikan kesimpulan yang menggambarkan partisipasi publik dalam merespon kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia melalui *digital public sphere*.

1.8.8 Kualitas Data

Upaya untuk memeriksa keakuratan dan kualitas dari data yang telah dikumpulkan dan melalui proses pengolahan data yang dilakukan sedemikian rupa merupakan tahapan penting yang dikenal sebagai validasi data (Creswell et al., 2015). Metode *mix method* yang digunakan dalam penelitian ini menimbulkan suatu konsekuensi yakni terdapat data yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif sehingga perlu dilakukan pengecekan keabsahan dari data-data yang telah didapatkan baik melalui teknik wawancara, observasi maupun *data crawling*. Guna memeriksa keakuratan dan kualitas dari data tersebut maka dilakukan proses triangulasi data. Proses ini dimaksudkan untuk melakukan pengecekan terhadap data dari berbagai

sumber, waktu serta teknik pengambilan data. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang berkualitas.